

2021

Laporan Kinerja Interim Triwulan II

**LOKA POM
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

 0821-9993-2245  lokapomtanimbar

 (0918) 21875  lokapom.tanimbar20@gmail.com

 **Jl. IR. Soekarno, Saumlaki, Maluku, Indonesia**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	0
KATA PENGANTAR	1
HIGHLIGHT S.D TRIWULAN II	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. STRUKTUR ORGANISASI	5
B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	5
C. ISU STRATEGIS TAHUN 2021	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Visi.....	9
B. Misi	10
C. Budaya Organisasi.....	16
D. Tujuan	16
E. Sasaran Kegiatan.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA	20
B. REALISASI ANGGARAN	28
BAB IV PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. SARAN	33
LAMPIRAN	35

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Triwulan II (TW II) tahun 2021.

Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selain untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi induk, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas pencapaian kinerja, serta memperbaiki dan menetapkan strategi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2021, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja TW II ini, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saumlaki, 14 Juli 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kepulauan Tanimbar



Stefanus Simon Sesa

HIGHLIGHT S.D TRIWULAN II

Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan, Sarana Pelayanan Kefarmasian serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) merupakan tugas dari Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian



Pada Triwulan II Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melakukan pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan dan Sarana Pelayanan Kefarmasian di Desa Namtabung dan Desa Lingat, Kecamatan Selaru.

KIE



Pada Triwulan II Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melakukan KIE Cara Ritel Pangan yang Baik bagi Sarana Distribusi Pangan di Saumlaki.

Audit Internal



Pada Triwulan II Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melaksanakan Audit Internal yang Lead Auditornya berasal dari Balai POM di Ambon.

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2021 disusun sebagai sarana evaluasi kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga diketahui capaian yang telah diperoleh serta tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan strategi serta upaya untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di triwulan berikutnya. Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada instansi induk yaitu Badan POM.

Dalam pelaksanaan kinerjanya Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melangkah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 8 Sasaran Strategis yang diukur melalui 18 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja masing-masing seksi dan bagian di Balai POM Ambon.

Berikut merupakan Sasaran Strategis, Indikator Kegiatan, serta Target Pencapaian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2021 :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60

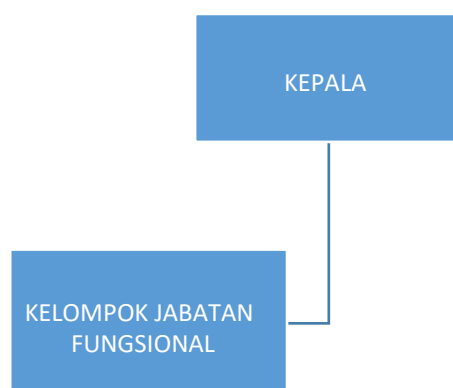
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kepulauan Tanimbar yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kepulauan Tanimbar	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kepulauan Tanimbar	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kepulauan Tanimbar secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Efisien (95%)

Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021

A. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipimpin oleh Kepala Loka yang langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 13 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Tenaga Pramubakti pada akhir Juni tahun 2021.

PNS di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi beberapa Fungsi, yaitu Fungsi Pengujian, Fungsi KIE, Fungsi Tata Usaha, Fungsi Pemeriksaan dan Fungsi Penindakan. Sedangkan Tenaga Pramubakti ditempatkan pada Fungsi Pemeriksaan 1 orang, 2 Petugas Kebersihan, 1 Satpam dan 1 Supir.

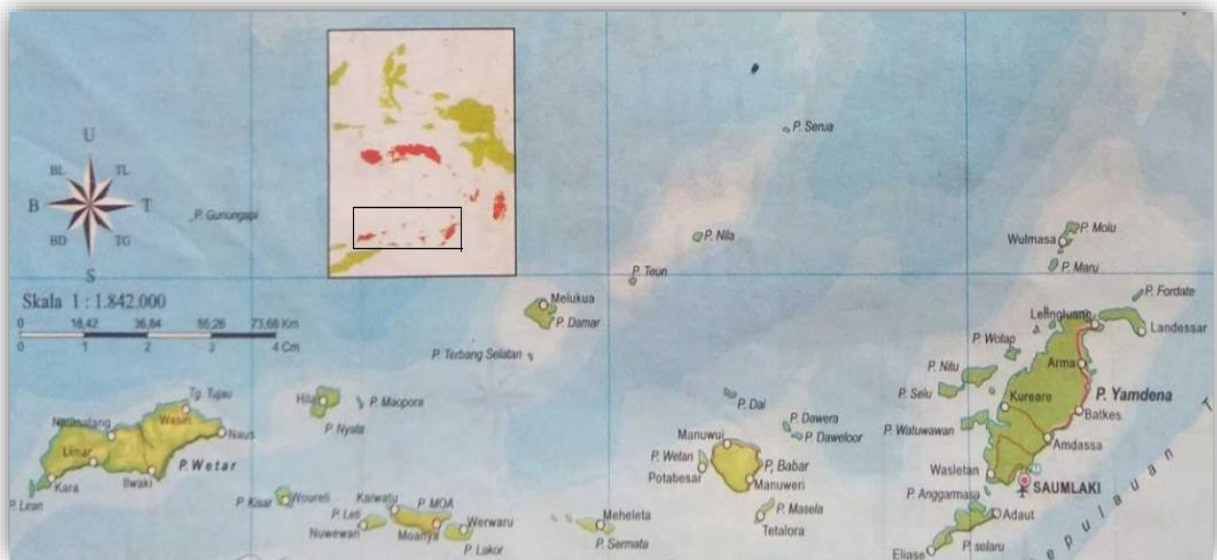
Keseluruhan pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)
I.	Struktural	1
	1. Eselon II	0
	2. Eselon III	0
	3. Eselon IV	1
II.	Fungsional	10
	1. PFM Pertama	10
	2. Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	0
III.	Pelaksana	2
	1. Verifikator Keuangan	1
	2. Pengadministrasi Umum (Calon Pranata Komputer)	1
Jumlah		13

Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021

2. Eksternal

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.



Gambar 1.2 Area Pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

C. ISU STRATEGIS TAHUN 2021

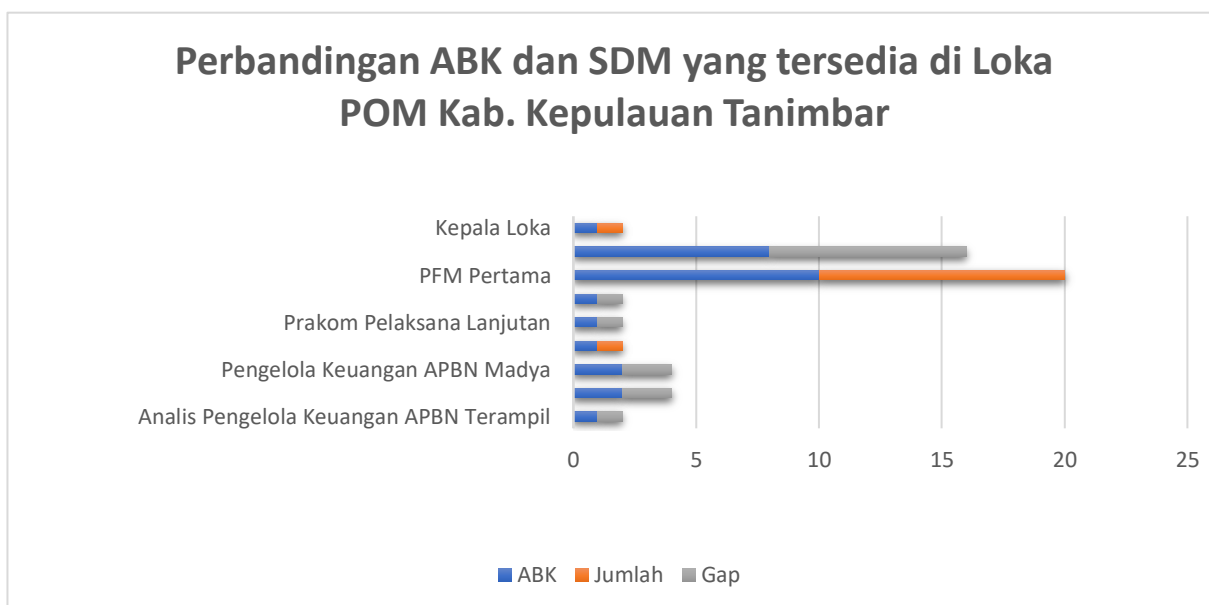
Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2021, antara lain:

1. Kapasitas Pengujian Loka

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan pengujian dengan metode uji cepat (rapid test kit) untuk komoditas pangan yang memenuhi kriteria parameter uji kritis yang ditetapkan. Adapun untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Koordinator (Balai POM di Ambon). Akan tetapi, dengan kendala geografis yakni Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah terpencil yang sulit akan akses pengiriman menyebabkan pengiriman sampel ke Balai Koordinator perlu koordinasi yang baik dengan *stakeholder* dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau Petugas Pelni di Pelabuhan maupun ABK kapal bahkan dengan buruh angkut agar pengiriman sampel dapat terkirim sesuai jadwal kapal dan bisa tiba di Balai Koordinator sesuai dengan jadwal sampling. Diharapkan dalam rentang tahun 2021 – 2024, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah memiliki fasilitas laboratorium sendiri untuk dapat melakukan pengujian mandiri terhadap produk yang disampling.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara Optimal. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2020-2024.



Gambar 1.3 Perbandingan ABK dan SDM yang tersedia di Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar

Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat gap antara pegawai yang tersedia dengan kebutuhan SDM. Persen pemenuhan jumlah pegawai masih 50% dibandingkan dengan analisis beban kerja.

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 realisasi indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan belum mencapai target kinerja. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

Selain itu, tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017, Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan diharapkan dapat dibuat turunan peraturan bupati yang mengatur hal tersebut agar pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa lebih optimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut :

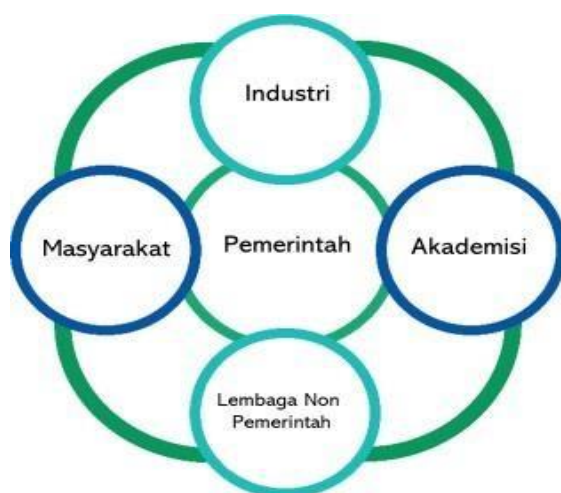
1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu : Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 1.4 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan Sumber:
<https://pentahelix.eu>

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman.

Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya :

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Badan POM akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

b. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan

memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun

daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamankan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

D. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

E. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketenruan</p> <p>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanimbar	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	<p>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>Persentasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>
SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang optimal	<p>Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar</p> <p>Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu</p> <p>Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</p>
SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal	Indeks professional ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

SK 8	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
------	---	--

Tabel 1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 pada triwulan II merupakan triwulan kedua penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2021. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2021 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria Indikator

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	$110\% \leq x \leq 120\%$
BAIK	$90\% \leq x < 110\%$
CUKUP	$70\% \leq x < 90\%$

KURANG	$50\% \leq x < 70\%$
SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Tabel 1.4 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada triwulan II. Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2021 triwulan II tersaji dalam berikut:

CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TRIWULAN II TAHUN 2021

Selama triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemik corona yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berikut adalah capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada triwulan II Tahun 2021 :

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Pencapaian Indikator	Analisis Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		s.d Triwulan II	s.d Triwulan II	s.d Triwulan II			
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	82.00	98,09%	Baik	Realisasi persentase obat memenuhi syarat berdasarkan hasil uji dan hasil uji sampel dari Loka masih ada yang belum memenuhi syarat (terutama tmk hasil penandaan dan tms hasil uji lab).	Menindaklanjuti feedback ke pusat terkait hasil tindak lanjut pengawasan label terhadap produk yang telah disampling dan Meningkatkan sampling obat yang beredar diwilayah kerja Loka POM.
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	100.00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	Kegiatan sampling dan pengujian sampel pangan terlaksana dengan baik dan telah melebihi target yang diharapkan. Namun persebaran jenis produk pangan olahan di wilayah kerja tidak merata, sehingga masih sulit menemukan beberapa produk pada kategori pangan tertentu di daerah selain Kota (Saumlaki). Jumlah sampel yang beredar di masyarakat kurang dan monoton sehingga sulit untuk memenuhi jumlah minimal sampel masuk lab.	Melakukan analisis lokasi dan persebaran jenis pangan olahan dib beberapa daerah cakupan sehingga dapat dilakukan perencanaan jenis sampel beserta lokasi sampling di awal tahun. Meningkatkan koordinasi dengan penanggungjawab laboratorium pangan terkait jumlah sampel minimal yang dapat masuk lab.
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	83,33	88,65%	Cukup	Realisasi persentase obat aman dan bermutu dan hasil uji sampel dari Loka masih ada yang belum memenuhi syarat (terutama tmk hasil penandaan dan tms hasil uji lab).	Menindaklanjuti feedback ke pusat terkait hasil tindak lanjut pengawasan label terhadap produk yang telah disampling dan Meningkatkan sampling obat yang beredar diwilayah kerja Loka POM.
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	76.00	88,37%	Cukup	Kegiatan sampling dan pengujian sampel pangan terlaksana dengan baik. Namun persebaran jenis produk pangan olahan di wilayah kerja tidak merata, sehingga masih sulit menemukan beberapa produk pada kategori pangan tertentu di daerah selain Kota (Saumlaki).	Penyusunan rencana pelaksanaan sebaiknya mempertimbangkan keterkaitan jenis pangan dan lokasi. Melakukan pembinaan terkait keamanan pangan untuk sampel - sampel targeted

								Hasil uji Laboratorium Beberapa sampel pangan targeted Tidak memenuhi syarat (TMS).	(UMKM ; pelaku usaha lokal) yang hasil uji produknya TMS uji lab.
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	90,91	102,15%	Baik	Sarana produksi dan distribusi yang diinspeksi sudah melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan oleh petugas Loka POM Tanimbar. Pada umumnya proses pelaksanaan perbaikan Petugas menjelaskan prosedur pelaksanaan perbaikan kepada sarana produksi atau distribusi yang diinspeksi, dan melaksanakan pelaporan secara konsisten.	Petugas menjelaskan nilai positif kepada sarana produksi dan distribusi jika melakukan perbaikan yang direkomendasikan. Petugas menjelaskan prosedur pelaksanaan perbaikan kepada sarana produksi atau distribusi yang diinspeksi, dan melaksanakan pelaporan secara konsisten. Selain itu, perlu dilakukan inventarisasi pelaksanaan keputusan / rekomendasi yang diterbitkan maupun yang diterima secara lebih baik.
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	55,45	92,42%	Baik	Kesadaran dari pelaku usaha dan instansi terkait masih cukup rendah untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut / feedback dari hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan petugas Loka POM Tanimbar.	Melakukan koordinasi dan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan ke sarana, supaya pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan.
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	0.00	-	-	Sudah ada permohonan pemeriksaan sarana produksi OT guna sertifikasi.	Sudah melakukan pemeriksaan sarana melalui zoom meeting, masih melakukan Pendampingan UMKM dan masih menunggu perbaikan CAPA.
		8	Persentase sarana produksi Obat dan	48	100.00	208,33%	Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian indikator sarana produksi obat yang MK pada TW II sudah baik dan melebihi	Melakukan inventarisasi sarana produksi obat dan makanan yang baru, untuk

			Makanan yang memenuhi ketentuan					target sarana yang MK Namun masih belum mewakili semua sarana produksi yang ada karena terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terkait kondisi geografis wilayah kerja Loka POM Tanimbar.	dilakukan pemeriksaan dan pembinaan serta melakukan analisis risiko untuk menentukan sarana produksi yang akan diperiksa.
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	79,31	139,14%	Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian indikator sarana distribusi obat dan makanan yang MK pada TW II sudah baik. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terkait kondisi geografis wilayah kerja Loka POM Tanimbar sehingga belum bisa melakukan inspeksi di sarana distribusi di wilayah yang belum diperiksa.	Melakukan pengawasan sarana distribusi, hingga sampai daerah pelosok wilayah kerja yang dapat dijangkau serta melakukan inventarisasi dan analisis risiko untuk pemeriksaan sarana distribusi.
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	75	91,61	122,15%	Tidak Dapat Disimpulkan	Pelaksanaan efektifitas KIE TW II berjalan dengan baik serta signal yang mendukung dalam pengisiannya.	Dapat melaksanakan survei efektifitas dengan baik sesuai dengan target dan perencanaan.
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	27,00	90,00%	Baik	Pelaksanaan sampling sampel obat sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi masih banyak Produk yang beredar tidak bervariasi dan ada beberapa kriteria sampling obat/kategori Obat terutama OT, SK, dan Kosmetik yang susah diperoleh di wilayah kerja Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar.	Melakukan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling bulanan dan tetap koordinasi dengan Balai Koordinator.
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa	30	26,10	86,99%	Cukup	Pelaksanaan sampling sampel makanan sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi masih	Melakukan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling bulanan dan tetap

			dan diuji sesuai standar					ada beberapa Produk makanan yang beredar tidak bervariasi.	koordinasi dengan Balai Koordinator.
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83	0.00	-	-	1. Hasil kegiatan intelijen dan patroli siber di Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran obat dan makanan namun produk yang dijual dalam jumlah sedikit, sehingga tindak lanjut yang diberikan masih tahap pembinaan dan peringatan; 2. Daerah pengawasan selain di Kota Saumlaki, masih minim kejahatan obat dan makanan sebab produk yang beredar masih dalam jumlah yang terbatas dan umumnya memiliki Nomor Izin BPOM, mengingat kondisi geografis wilayah daerah kepulauan, dan di beberapa daerah belum memiliki akses jaringan yang memadai sehingga diprediksi kejahatan obat dan makanan masih kurang; 3. Belum adanya pelaporan / informasi / keluhan terkait kejahatan obat dan makanan yang terjadi di wilayah kerja kami baik itu dari pihak lain dan /atau masyarakat di Kab. Kepulauan Tanimbar dan Kab. Maluku Barat Daya.	1. Melaksanakan kegiatan intelijen; 2. Melaksanakan kegiatan patroli siber.
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	50.00	100,00%	Baik	Capaian indikator implementasi RB terlaksana dengan baik karena telah dilaksanakannya audit internal pada triwulan II. Maka, pada triwulan ini dilakukannya perbaikan dokumen – dokumen..	Melengkapi terkait hal-hal yang menyangkut audit internal, manajemen resiko dan QMS serta mempersiapkan untuk audit eksternal pada Triwulan selanjutnya.

		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	45	44,44	98,77%	Baik	Meskipun capaian sudah terlaksana dengan baik, tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi dalam dokumen ketatausahaan yang dilaporkan, yaitu terlambatnya rhpk/rapk karena menunggu hasil uji dari balai.	Meningkatkan koordinasi dengan Laboratorium Penguji.
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60.00	57.14	95.24%	Baik	Capaian indikator telah terlaksana dengan baik, dimana Realisasi dokumen PK, RAPK, RKT, RKAKL-DIPA telah disusun tepat waktu tanpa adanya kendala yang signifikan.	Mempertahankan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen PK, RKT, RAPK, RKAKL-DIPA.
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	-	-	-	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.	Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Penilaian dilakukan pada akhir tahun.
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100.00	105.26%	Baik	Capaian indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT sudah terlaksana dengan baik, tidak ada kendala berarti yang dihadapi. Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar merupakan Satker baru, maka pengelola keuangan di Loka juga menjalankan tupoksinya dengan masih belajar dari Balai Koordinator, RorenKeu, KPPN,	Menyesuaikan POA (Plan of action) / RPD dan mematuhi POA / RPD yang telah disusun ulang. Meningkatkan penggunaan anggaran ketika tidak dilakukannya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

								KPKNL dan KanWil. Adapun kendala lainnya yang dihadapi saat ini adalah mulai meningkatnya covid-19 varian delta pada awal Juni yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang harus ditunda / tidak diikuti untuk mencegah penyebaran virus ke para pegawai Loka dan masyarakat.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Tabel 1.5 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Berdasarkan Renstra dan Indikator Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 4.450.453.000,-. Anggaran tersebut telah dilakukan revisi dan mengalami pengurangan karena penghematan anggaran (*refocusing* anggaran), sehingga anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 4.327.758.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2021 adalah Rp 1.924.330.113,- atau 44,46%. Meningkatnya pandemi covid-19 varian delta yang membuat pemerintah masih mengadakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro pada bulan Juni di Jawa dan Bali, menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diikuti, sehingga penggunaan anggaran belum terserap secara optimal.

Meskipun Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar merupakan Satker baru, namun pengelola keuangan di Loka juga menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik serta tetap belajar dan berkoordinasi pada Balai Koordinator, RorenKeu, KPPN, Kantor Wilayah, Kantor Pajak, KPKNL serta Instansi lain yang terkait.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasar Analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	Output (Indikator)	ANGGARAN	REALISASI	Input (Anggaran)	IE	SE	TE	CAPAIAN TE	KATEGORI	KET.
3165.ADD.004	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice [Base Line]	1	0.83	83.30%	75,000,000	62,474,782	83.30%	1.00	1	0.00	100 %	Efisien	
3165.AEA.004	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM I	1	0.50	50.00%	26,918,000	10,971,600	40.76%	1.23	1	0.23	95 %	Efisien	Masih Tahap Investigasi dan Pendalaman Informasi
3165.BAH.002	Keputusan / Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM	1	0.00	0.00%	1,299,000	0	0.00%	#DIV /0!	1	#DIV /0!	#DIV/0!	Belum Bisa Dinilai, Penilaian Di Akhir Tahun	Belum Ada Permohonan Sertifikasi, namun telah selesai Pemeriksaan Sarana dan Masih dalam Proses Pendampingan UMKM
3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM	100	57.00	57.00%	75,000,000	35,509,200	47.35%	1.20	1	0.20	100 %	Efisien	
3165BKB.001	Layanan Koordinasi Pengawasan	1	0.44	44.29%	585,493,000	259,309,251	44.29%	1.00	1	0.00	100 %	Efisien	

	Obat dan Makanan												
3165.BMB.002	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM	25	19.00	76.00%	49,000,000	16,390,000	33.45%	2.27	1	1.27	86 %	Tidak Efisien	
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0.80	80.00%	450,000,000	0	0.00%	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Bisa Dinilai, Penilaian Di Akhir Tahun	Dalam Tahap Desain Interior dan Eksterior Mobling
3165.QCD.002	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Tanimbar	1	0.04	4.26%	129,208,000	5,505,000	4.26%	1.00	1	0.00	100 %	Efisien	Masih Tahap Investigasi dan Pendalaman Informasi
3165.QIA.002	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM	206	107.00	52.20%	103,702,000	34,570,400	33.34%	1.57	1	0.57	92 %	Efisien	
3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM	150	81.00	54.00%	138,991,000	51,581,600	37.11%	1.46	1	0.46	92 %	Efisien	

3165.QIC.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM	10	5.00	50.00%	28,491,000	13,155,200	46.17%	1.08	1	0.08	100 %	Efisien
3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM	420	232.00	55.24%	541,003,000	278,747,871	51.52%	1.07	1	0.07	100 %	Efisien
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	1	0.50	50%	2,123,653,000	1,156,115,208	54.44%	0.92	1	-0.08	75 %	Tidak Efisien
Total Keseluruhan				50,48%	4,327,758,000	1,924,330,112	44,46%	1.14	1	0.14	100%	Efisien

Tabel 1.6 Tingkat Efisiensi Kegiatan

Pada triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan 13 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil 9 kegiatan efisien, 2 kegiatan tidak efisien dan 2 kegiatan belum bisa dinilai. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,08 sampai 1,27.

Masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak efisien, yaitu :

1. Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM.

Pada Triwulan II realisasi kegiatan Layanan Publikasi sebanyak 19 dari target tahunan 25 Layanan. Kegiatan ini tidak efisien dikarenakan output kegiatan lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran pada kegiatan ini. Selisihnya terlalu jauh yang menyebabkan hasil perhitungan dari kegiatan ini tidak efisien.

2. Layanan Perkantoran UPT.

Pada Triwulan II Layanan Perkantoran UPT dihitung dengan ($\text{Bulan } n / \text{Jumlah Bulan dalam Setahun} \times 100$), yaitu $6 / 12 \times 100$. Perhitungan ini dilakukan karena layanan perkantoran UPT dilaksanakan setiap hari, setiap bulan dengan target tahunan 1 Layanan. Kegiatan ini tidak efisien dikarenakan output kegiatan lebih kecil jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran yang digunakan pada kegiatan ini. Hal itu disebabkan karena perhitungan output kegiatannya.

Selain itu, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum bisa dinilai, yaitu :

1. Keputusan / Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM.

Pada Triwulan II ini, belum adanya permohonan sertifikasi yang masuk dan telah selesai melaksanakan pemeriksaan sarana serta masih dalam tahap pendampingan UMKM. Pada kegiatan ini juga belum ada penggunaan anggaran yang digunakan. Serta target pada kegiatan ini pun ditetapkan di akhir tahun, sehingga penilaiannya dilaksanakan di akhir tahun.

2. Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.

Pada Triwulan II ini, sudah sampai pada tahap desain interior dan eksterior mobling dan juga belum adanya penggunaan anggaran yang digunakan pada kegiatan ini. Kegiatan ini direncanakan selesai pada akhir Triwulan III, sehingga penilaian baru bisa dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak efisien, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa berupaya meningkatkan kinerjanya pada triwulan mendatang. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada triwulan II tahun 2021 ini Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum selesai disusun, sehingga evaluasi interim triwulan II ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Ambon. Untuk menunjang pencapaian 8 sasaran strategis dan 18 indikator tersebut, telah dilakukan 16 kegiatan utama. Dari 8 sasaran strategis hanya terdapat 6 sasaran strategis yang indikatornya dapat diukur di triwulan II, sedangkan 2 sasaran strategis yang lain akan diukur pada akhir tahun 2021. Dari sasaran strategis yang dapat diukur tidak ada yang memperoleh capaian indikator sangat baik, namun memperoleh capaian indikator baik sebanyak 8, capaian indikator cukup sebanyak 3 dan capaian indikator yang tidak dapat disimpulkan sebanyak 4. Hal ini mengharuskan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meningkatkan capaian kinerjanya.

Berdasarkan analisis efisiensi anggaran terhadap 13 kegiatan utama, diperoleh hasil bahwa 9 kegiatan sudah efisien, 2 kegiatan tidak efisien dan 2 kegiatan belum bisa dinilai pada triwulan II. Hal ini disebabkan karena ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan untuk mencapai output kegiatan yang diharapkan. Di samping itu, tidak bisa dipungkiri meningkatnya pandemi Covid-19 varian delta yang dimulai pada awal bulan Juni tahun 2021 di Indonesia memberi dampak terhadap terhambatnya pelaksanaan kegiatan di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna memutus rantai penyebaran covid-19 varian delta, mengingat wilayah geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah kepulauan yang kebanyakan harus ditempuh menggunakan kapal laut dan pesawat kecil dibanding ditempuh dengan jalur darat.

B. SARAN

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada triwulan berikutnya perlu dilakukan evaluasi yang konsisten secara periodik untuk mengawal ketercapaian target hingga akhir tahun 2021.

2. Perlu dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi berupa langkah-langkah nyata pada beberapa indikator yang belum mencapai target di triwulan II sebagai aksi tindakan perbaikan secara periodik, sehingga indikator - indikator yang belum mencapai target dapat tercapai di akhir tahun 2021.
3. Perlu meningkatkan koordinasi ke Balai Koordinator dan Stakeholder lainnya dalam membantu meningkatkan pencapaian kinerja dan memperluas kerjasama.
4. Meningkatkan dan mengeratkan komunikasi sesama pegawai di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kerja dalam pencapaian target kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

LAMPIRAN

Lampiran I

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2021												
Di Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar												
sd. Triwulan II (April - Juni 2021)												
KODE	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	Output (Indikator)	ANGGARAN	REALISASI	Input (Anggaran)	IE	SE	IE - SE (TE)	CAPAIAN TE	KET.
3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice [Base Line]	1	0.83	83.30%	75,000,000	62,474,782	83.30%	1.00	1	0.00	100 %	
3165.AEA.002	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM I	1	0.50	50.00%	26,918,000	10,971,600	40.76%	1.23	1	0.23	95 %	
3165.BAH.002	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM	1	0	0.00%	1,299,000	0	0.00%	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!	Penilaian di Akhir Tahun
3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM	100	57	57.00%	75,000,000	35,509,200	47.35%	1.20	1	0.20	100 %	
3165.BKB.001	Layanan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0.44	44.29%	585,493,000	259,309,251	44.29%	1.00	1	0.00	100 %	
3165.BMB.002	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM	25	19	76.00%	49,000,000	16,390,000	33.45%	2.27	1	1.27	86 %	
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0.80	80.00%	450,000,000	0	0.00%	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!	Penilaian di Akhir Tahun
3165.QCD.U49	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Tanimbar	1	0.04	4.26%	129,208,000	5,505,000	4.26%	1.00	1	0.00	100 %	
3165.QIA.002	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM	205	107	52.20%	103,702,000	34,570,400	33.34%	1.57	1	0.57	92 %	
3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM	150	81	54.00%	138,991,000	51,581,600	37.11%	1.46	1	0.46	92 %	
3165.QIC.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM	10	5	50.00%	28,491,000	13,155,200	46.17%	1.08	1	0.08	100 %	
3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM	420	232	55.24%	541,003,000	278,747,871	51.52%	1.07	1	0.07	100 %	
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	1	0.50	50%	2,123,653,000	1,156,115,208	54.44%	0.92	1	-0.08	75 %	
	Total Keseluruhan			50.48%	4,327,758,000	1,924,330,112	44.46%	1.14	1	0.14	100 %	Efisien

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021

Loka POM	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target (Kumulatif)	Realisasi Per Trwulan (Kumulatif)		Capaian Terhadap Target TW (Kumulatif)	Capaian Terhadap Target Tahun (Kumulatif)	
			s.d TW II	s.d TW II	Pembilang	Penyebut	Realisasi	s.d TW II	s.d TW II
Kepulauan Tanimbar	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%	83.60%	41	50	82.00%	98.09%	98.09%
Kepulauan Tanimbar	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	80.00%	70	70	100.00%	125.00%	125.00%
Kepulauan Tanimbar	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.00%	94.00%	15	18	83.33%	88.65%	88.65%
Kepulauan Tanimbar	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.00%	86.00%	19	25	76.00%	88.37%	88.37%
Kepulauan Tanimbar	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%	89.00%	64	66	90.91%	102.15%	102.15%
Kepulauan Tanimbar	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.00%	60.00%	55	77	55.45%	92.42%	92.42%

Kepulauan Tanimbar	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88.00%	88.00%	0	0	#DIV/0!	0	0
Kepulauan Tanimbar	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48.00%	48.00%	5	5	100.00%	208.33%	208.33%
Kepulauan Tanimbar	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%	57.00%	184	232	79.31%	139.14%	
Kepulauan Tanimbar	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75.00%	75.00%			91.61%	122.15%	122.15%
Kepulauan Tanimbar	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%	30.00%	81	150	27.00%	90.00%	54.00%
Kepulauan Tanimbar			12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%	30.00%	107	205	26.10%	86.99%	52.20%
Kepulauan Tanimbar	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83.00%	-			0.00%	0	0.00%
Kepulauan Tanimbar	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00%	50.00%	2	4	50.00%	100.00%	50.00%
Kepulauan Tanimbar	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100.00%	45.00%	24	54	44.44%	98.77%	44.44%
Kepulauan Tanimbar	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00%	60.00%	4	7	57.14%	95.24%	57.14%
Kepulauan Tanimbar	7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77.00%	-				0	0.00%
Kepulauan Tanimbar	8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	95			100%	1.05%	1.05%